

Perkembangan konflik Kashmir pertama kali terjadi pada dekade 1840-an ternyata masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah India. Sejak tahun 2008 persoalan mengenai krisis Kashmir berkembang menjadi terbentuknya kekerasan, yaitu separatisme dan terorisme. Dalam menangani konflik Kashmir, selama ini cenderung mengedepankan tindakan-tindakan fisik/militer. Pada kenyataannya tindakan ini tidak cukup efektif dalam penyelesaian krisis ini. Kemudian pada tahun 2008-2012, pemerintah India di bawah kepemimpinan Manmohan Singh mulai mengembangkan kebijakankebijakan baru dalam konteks domestik, antara lain perlindungan terhadap masyarakat sipil, promosi dan penerapan HAM, serta penegakan hukum. Berkembangnya persoalan Kashmir, tidak hanya menjadi persoalan domestik namun juga regional kemudian mendorong pemerintah India di bawah kepemimpinan Manmohan Singh untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam konteks eksternal. Kebijakan ini meliputi kerjasama dengan SAARC, PBB dan ICRC. Dari penelitian ini penulis dapat memperoleh learning point bahwa persoalan kekerasan yang terjadi di berbagai negara dunia, termasuk pada konflik Kashmir merupakan bagian dari pergeseran dinamika konflik yang terjadi di negara-negara dunia. Pada akhirnya aksi teror, intimidasi, klandestin dan beberapa kasus lainnya berdampak pada rentannya masyarakat pada kedua wilayah yang terlibat konflik, seperti halnya konflik Kashmir. Untuk itu, perlu sekiranya para pemangku kepentingan (stakeholder) perlu memikirkan langkah-langkah penyelesaian tidak hanya mengedepankan tindakan militer, namun juga kemanusiaan dan kerjasama regional ataupun internasional.